

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN “PRO-GROWTH, PRO-POOR, AND PRO-HUMAN DEVELOPMENT” DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rustan A.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN
Jl. HM. Ardan (Ring Road III) Samarinda.
(Email: rustanamarullah8@gmail.com)

Abstract

Development and public policy are two things that can not be separated. Among various choices of public policy instruments, local governments have to cope with difficult tasks in order to bring equitable regional development and prosperity to society. This paper aims to evaluate the performance of local governments in East Kalimantan Province through the variables of economic growth, poverty alleviation and unemployment, and the quality of human resources. Governments' capacity to manage these indicators indicates the achievement in regional development. By using rank analysis, it can be seen the strength and the weaknesses each regency/ city in order to accelerating socio-economic development in East Kalimantan. The analysis showed that on average, the regions that have superior performance in pro-growth, pro-poor, and pro-human development policy are Balikpapan City and Paser Regency; while Tana Tidung Regency gets the lowest rank and need to accelerate the social-economic development in its region rapidly. However, in each development indicators that are used in this article also showed that there are city/ regency that experience the highest rank and the lowest rank. Thus, the findings demonstrate that particular city/ regency in east Kalimantan Province has better-quality in specific development policy, and it can be replicated to other regions (specifically for least development region)

Keywords: *Development Policy, Economic Growth, Poverty and Unemployment Rate, HDI.*

Intisari

Pembangunan dan kebijakan publik merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan. Upaya menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat melalui pembangunan daerah yang merata dengan tatakelola yang baik adalah tugas berat yang dijalankan oleh pemerintah daerah diantara berbagai pilihan instrument kebijakan publik. Tulisan ini mencoba untuk

¹Naskah diterima 17 November 2011, revisi kesatu 4 Maret 2012

Rustan A.

melihat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Timur melalui pendekatan kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kemampuan pemerintah daerah mengelola indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Dengan menggunakan analisis ranking, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing kabupaten/ kota dalam peningkatan pembangunan sosial-ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rata-rata daerah yang memiliki kinerja *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-human development* terbaik di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser. Sedangkan daerah yang memerlukan akselerasi kebijakan pembangunan sosial-ekonomi daerahnya adalah Kabupaten Tana Tidung. Meskipun demikian, dalam setiap elemen kebijakan pembangunan tersebut, terdapat daerah dengan peringkat tertinggi dan daerah dengan peringkat terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan pada kebijakan pembangunan tertentu, sehingga upaya replikasi kebijakan pada daerah yang masih tertinggal layak untuk diterapkan.

Kata kunci : Kebijakan Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, IPM

1. Pendahuluan

Impian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai melalui usaha-usaha pembangunan yang terencana dan terarah. Pembangunan pun dapat diartikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap upaya perbaikan kondisi masyarakat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah/ kepercayaan yang telah diberikan. Selain itu, stimulasi pembangunan terus didorong guna menjadi daerah yang lebih maju dan superior dibandingkan daerah lain. Namun demikian, seringkali terjadi kesalahan dalam penentuan kebijakan pembangunan, dimana seharusnya yang dilakukan adalah pembangunan daerah (*regional development*) dalam arti seluruh entitas, dan bukan dalam artian pembangunan di daerah

(*development in regional*) yang hanya mengedepankan peningkatan ekonomi makro. Melejitkan pertumbuhan ekonomi makro daerah memang merupakan elemen penting yang menunjang pembangunan, namun terkadang upaya tersebut tidak menimbulkan efek penetesan (*trickle down effect*) yang signifikan dengan kesejahteraan masyarakat, apalagi jika berkaca pada daerah yang kaya dengan sektor pertambangan sebagai tulang punggungnya namun masyarakatnya tetap berkesusahan. Atas dasar tersebut, pembangunan secara multidimensional adalah pilihan cerdas yang perlu didorong.

Dalam menggerakkan roda pembangunan secara multidimensional, secara mendasar perlu melibatkan tiga komponen utama yaitu *private* sektor, masyarakat, dan pemerintah (dengan instrumen

kebijakan publik yang ada) sebagai aktor utama. Sebab pemerintah memiliki fungsi eksklusif yang tidak dimiliki komponen lainnya yaitu fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat (Mariana, dkk., 2010). Konsepsi yang dikenal dengan istilah *good governance* ini memang sudah sangat umum diketahui, namun implementasinya kurang mampu terpadukan dengan baik. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ruang bagi pemerintah dan swasta lebih menonjol dibandingkan ruang bagi masyarakat. Oleh karenanya, pemaknaan yang utuh akan tata kelola daerah yang baik dalam kerangka seharusnya (*das Sollen*) menurut konsep *good governance* perlu diperkuat, sehingga mampu mendorong performa daerah seluruhnya.

Kolaborasi antara pembangunan dan konsep *good-governance* dalam pembangunan daerah penting untuk diperhatikan agar tercipta pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja secara efisien, yakni mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Keterkaitan antara pembangunan dan *good-governance* juga pernah disinggung oleh Koffi Annan (mantan Sekretaris Jenderal PBB) dengan mengatakan "*good governance is perhaps the single most important factors in eradicating poverty and promoting development. Without it, no amount of funding, no short-term economic miracle will set the developing world on the path to prosperity*". Meskipun demikian, perspektif mengenai tatakelola pemerintahan (*governance*) cukup beragam, setidaknya terdapat 3 (tiga) pandangan yang berbeda mengenai

titik tekan dari tatakelola itu sendiri (Teddy Lesmana, 2007), yaitu:

1. **Kalangan pertama**, yaitu kalangan yang memfokuskan definisi tata kelola terkait dengan rezim politik yang berlaku yakni yang berhubungan dengan kontestasi dan proses politik, kebebasan sipil dan politik, dan legitimasi pemerintah. Dari perspektif ini demokrasi, hak azasi manusia, partisipasi dan kebebasan pers adalah elemen yang penting.
2. **Kalangan kedua**, yang menitikberatkan pada pengelolaan ekonomi (*economic management*). Definisi *governance* dalam konteks ini difokuskan kepada pelaksanaan yang baik terhadap tata kelola sumberdaya ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah. Menurut perspektif ini, pengelolaan ekonomi yang reliabel memerlukan dukungan dari birokrasi yang efisien dan didasarkan pada proses pembuatan keputusan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karenanya, tata kelola yang baik dipandang akan meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas publik dan manajemen ekonomi yang efektif guna menghindari penundaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah, penyimpangan dan korupsi serta distorsi-distorsi lainnya.
3. **Kalangan ketiga**, yang menekankan pengertian tata-kelola pada substansi kebijakan ekonomi

Rustan A.

untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang dihadapi suatu negara. Dari perspektif ini, kualitas tata-kelola direfleksikan dalam kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Hal ini bergantung kepada tujuan khusus pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan juga bergantung kepada konteks politik, budaya dan sejarah serta kapasitas para penyelenggara negara.

Atas dasar pandangan di atas, tulisan ini berusaha untuk mengkhususkan penggalian pandangan kalangan ketiga atas pengelolaan pemerintahan daerah, yakni penilaian atas kinerja kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah –masalah pembangunan khususnya pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan angka pengangguran, dan peningkatan kualitas manusia. Terkait dengan hal ini, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (2011) mengatakan bahwa saat ini pelaporan keuangan daerah kurang efisien dan akan lebih baik jika disederhanakan ke dalam tiga aspek saja. Ketiga aspek tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan yang diyakini sudah bisa mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, penilaian atas aspek yang dapat direfleksikan dengan

kebijakan *Pro-Growth, Pro-Poor, and Pro-Human Development* dalam tulisan ini menjadi penting untuk dibahas.

Sebagai bahan perbandingan, beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis *development-gap* antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan faktor-faktor penyebabnya diantaranya Hall (2007) yang mengklasifikasikan negara berdasarkan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas keuangan ke dalam empat kategori yaitu, *lagging, low, developing, dan progressive*; Brodjonegoro (1999) dalam Tambunan (2001) yang mengaitkan PDRB perkapita dan IPM antarProvinsi, serta hasil kajian dari Yayasan Indonesia Forum (2000) yang menemukan adanya korelasi positif antara daerah yang kaya sumberdaya alam (SDA) dan atau sumberdaya manusia (SDM) dengan peranan PAD di dalam APBD. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dalam tulisan ini metode analisis yang digunakan adalah analisis peringkat/ ranking (*rank analysis*), yang merupakan metode non-kuantitatif dengan mengurutkan nilai data dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga dapat diketahui tinggi atau rendahnya pencapaian Kabupaten/ Kota atas suatu indikator. Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut dapat disusun saran-saran kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dimasa mendatang serta menjadi bahan bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

2. Pembangunan Daerah dan Konsep *Pro-Growth, Pro-Poor, and Pro-Human Development*

Pembangunan daerah tetap menjadi isu menarik untuk didiskusikan, desentralisasi disertai globalisasi telah merubah struktur dan cara daerah bekerja, yang kemudian menghadapkan daerah pada posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran daerah sangat penting dikarenakan daerah mampu membuat kebijakan yang lebih spasial dibandingkan pemerintah pusat yang lebih bersifat makro. Selain itu, keputusan di tingkat daerah dapat di atur dengan lebih baik, terutama yang menyangkut pemerataan pembangunan dalam wilayah, penetapan sektor unggulan, penyerasian keterkaitan antar sektor, pemenuhan kebutuhan pangan wilayah, dan kelestarian lingkungan hidup (Tarigan, 2005).

Pondasi dasar dari pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi. Dalam RPJM 2010-2014 secara eksplisit juga mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi adalah salah satu aspek yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan agregat output atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kinerja perekonomian yang kondusif, tangguh dan berkembang, sedangkan

pertumbuhan yang negatif mencerminkan kelesuan ekonomi daerah dan turunnya *output* secara agregat (BPS, 2011).

Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai (Tambunan, 2001). Sejalan dengan hal tersebut, Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM tahun 2010-2014 menegaskan bahwa strategi *pro growth* mengupayakan terjadinya percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini akan berdampak melebar pada terciptanya iklim investasi yang kondusif; yang juga ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja yang tercipta, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai guncangan (*shock*) dari luar.

Adapun kemiskinan tetap dianggap sebagai “musuh” pembangunan. Kemiskinan diidentifikasi sebagai refleksi rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang berujung pada pengangguran di usia produktif. Juga menunjukkan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, dan menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan warganya (Gazi, 2007; Mehmood, 2010). Keberhasilan penanggulangan kemiskinan selain merupakan hasil dari pengaruh laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi juga perlu didukung oleh

Rustan A.

berbagai program intervensi dari pemerintah yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, yang terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar juga dapat menikmati laju percepatan pertumbuhan ekonomi (Perpres No. 5 Tahun 2010).

Terkait upaya untuk keluar dari jurang kemiskinan yang kian dalam (*anti-poverty policy*), pembangunan kualitas *human capital* juga hal pokok yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini. Upaya peningkatan kualitas SDM, yang dalam skala lebih luas disebut sebagai pembangunan manusia mutlak terus dilakukan oleh pemerintah, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, serta kemampuan daya beli di masyarakat (BPS, 2011). Kualitas *human capital* ini dapat tergambarkan melalui besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan salah satu indikator sosial untuk mengukur kesejangan pembangunan antardaerah. secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin baik pembangunan di suatu wilayah, maka semakin tinggi IPM daerah tersebut (Tambunan, 2001).

Faktor lain yang juga mendukung implementasi kebijakan pembangunan daerah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah telah menciptakan ruang gerak yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di

daerahnya. Peningkatan pembangunan yang signifikan, akan melejitkan daya saing dan persaingan antar daerah. Oleh karena itu, dituntut kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan *Pro-Growth, Pro-Poor, dan Pro-Human Development* yang lebih optimal, inovatif, dan berkelanjutan.

3. Mengenal Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya menindaklanjuti Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, telah menyusun 10 agenda prioritas pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan menekankan pada kesejahteraan dan menajamkan keterkaitan sasaran pada akhir tahun 2013, yakni mengatasi pengangguran, pembangunan infrastruktur perekonomian, perhatian terhadap pendidikan, penanganan banjir, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, penyelesaian krisis listrik, kemandirian pangan, pembangunan kawasan perbatasan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun agenda kebijakan pembangunan yang siap untuk dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
2. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kelautan.
3. Perbaikan listrik dan program satu

- genset satu desa.
4. Penyediaan akses sekolah gratis, bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, beasiswa bagi Mahasiswa Kalimantan Timur, pembangunan asrama mahasiswa dan tambahan penghasilan guru pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta (termasuk guru bantu dan honorer) sebesar 20%.
 5. Pelayanan kesehatan gratis, program 1 puskesmas dua dokter dan peningkatan pelayanan posyandu untuk kesejahteraan ibu, anak dan lansia.
 6. Penyerapan 300.000 tenaga kerja melalui pengadaan dan pengembangan UKM melalui bantuan tanpa agunan.
 7. Bantuan pengadaan dan penyediaan air bersih di tingkat desa/kelurahan.
 8. Bantuan khusus bagi masyarakat adat dan perbatasan.
 9. Bantuan untuk tempat ibadah bagi semua agama.
 10. Menciptakan aparaturnya pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agenda-agenda tersebut selanjutnya ditransformasi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan iklim investasi, peningkatan daya saing, pendidikan dan kesehatan. yang dapat dinilai hasilnya melalui pendekatan analisis ranking dari PDRB, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan

kualitas sumberdaya manusia (Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai oleh masing-masing kabupaten/ kota.

Selain kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur juga melakukan berbagai inovasi dan terobosan lainnya dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan di daerahnya, diantaranya : Bekerjasama dengan swasta untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; Pengembangan kawasan industri, Pembentukan Dewan Ekonomi Daerah (DED); juga Menggalakkan promosi potensi daerah kepada investor dari dalam maupun luar negeri. Rangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui agenda kebijakan pembangunan tersebut sudah mengarah pada dukungan pencapaian ketiga aspek yang dibahas dalam tulisan ini; dan diharapkan dapat menggambarkan optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur.

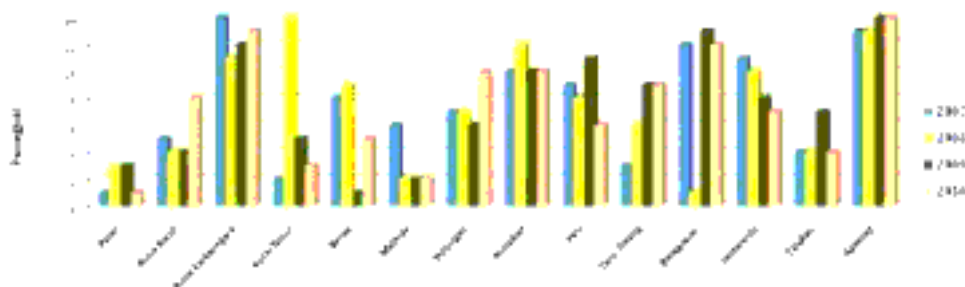
4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional

Salah satu misi Provinsi Kalimantan Timur adalah mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Struktur kinerja ekonomi daerah yang baik tercermin pada pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB perkapita yang terus meningkat. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, berikut

Rustan A.

disajikan perbandingan peringkat pertumbuhan PDRB seluruh

Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Timur.



Gambar 1. Analisis Peringkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2010 (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2011 (setelah diolah))

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2007-2010 Kabupaten Paser menempati peringkat tertinggi dengan menampilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11.3%, yang mencerminkan iklim investasi di daerah tersebut cukup menggiat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga ditunjukkan oleh Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tarakan dengan menduduki peringkat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dan ketiga dengan rata-rata pertumbuhan 9.4% dan 6.6%. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan memberikan *multiplier effect* ke sektor-sektor *non-base* yang menyokong aktivitas ekonomi utama. Disamping itu, juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menstimulasi seluruh komponen ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhannya.

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan kemudahan dan iklim berinvestasi

yang kondusif pada daerah tersebut, selanjutnya tingginya investasi akan memberikan *trickle-down effect* pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun peringkat pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kota Bontang dengan rata-rata pertumbuhan -2.5%, diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rata-rata pertumbuhan 1.6%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini diakibatkan besarnya pengaruh minyak, gas, dan batubara pada perekonomian kedua daerah tersebut, sehingga menjadikan pertumbuhannya cukup rentan jika terjadi penurunan kontribusi pada sektor penggalian dan pertambangan tersebut.

Ukuran lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi (*pro-growth*) adalah pertumbuhan PDRB perkapita. PDRB perkapita dinilai mampu menunjukkan kemampuan daerah untuk meningkatkan outputnya lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya,

serta penilaian atas sebaran output yang dihasilkan penduduk dalam daerah tersebut. Berikut disajikan pertumbuhan PDRB perkapita menurut

Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada rentang waktu 2007-2010.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2010

Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)			Rank Analysis		
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Paser	3.27	3.91	13.50	5	4	1
Kutai Barat	4.86	4.94	4.33	3	3	5
Kutai Kartanegara	0.82	-1.67	0.40	10	13	12
Kutai Timur	-6.18	-0.05	3.93	14	10	7
Berau	0.73	6.12	4.05	11	1	6
Malinau	2.45	3.71	8.53	6	5	2
Bulungan	6.54	1.08	2.18	2	7	11
Nunukan	-1.64	-1.47	0.33	12	12	13
PPU	2.33	0.90	4.81	7	8	4
Tana Tidung	-1.76	-3.98	-1.97	13	14	14
Balikpapan	6.85	5.55	5.84	1	2	3
Samarinda	1.49	1.21	3.13	8	6	10
Tarakan	1.36	-0.05	3.36	9	9	8
Bontang	3.29	-1.00	3.33	4	11	9

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2011 (setelah diolah)

Ditinjau dari pertumbuhan PDRB perkapita, dalam kurun waktu 2007-2010 terjadi pergeseran peringkat yang cukup signifikan. Terdapat daerah-daerah yang mampu mendongkrak pertumbuhan PDRB perkapitanya secara positif setiap tahunnya seperti yang terjadi pada Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Malinau. Peningkatan peringkat ketiga daerah tersebut menunjukkan kemampuan menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Jika di analisis lebih lanjut, hal ini juga mengindikasikan adanya upaya ketiga daerah tersebut untuk mengejar ketertinggalan daerahnya terhadap Kota-Kota besar

yang ada di Kalimantan Timur.

Adapun daerah-daerah yang mengalami kecenderungan penurunan peringkat diantaranya adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Balikpapan. Kecenderungan penurunan pertumbuhan PDRB perkapita tentunya kurang menguntungkan bagi daerah, sebab kondisi ini menggambarkan dispersi output daerah yang semakin mengecil. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang lebih ekspansif guna meningkatkan pendapatan perkapita regional.

Rustan A.

Hal yang perlu dipahami adalah PDRB yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya secara utuh, sebab belum tentu PDRB yang tinggi tersebut dirasakan secara merata oleh masyarakat (*equally*), sehingga diperlukan penilaian keberhasilan pada dimensi yang lain seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta kualitas sumberdaya manusianya.

5. Analisis Kinerja Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Daerah

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi "kendaraan" dan bahan politik yang cukup menarik simpati publik, sehingga begitu gencar dideklarasikan. Sukses dalam menekan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran akan meningkatkan

popularitas pemerintah (terutama kepala daerah). Namun sebaliknya, ketidakmampuan dalam mengurangi angka kemiskinan akan menjadi "santapan empuk" bagi lawan-lawan politik dan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah daerah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan harapan akan menimbulkan efek sebar (*spread effect*) pada meningkatnya kesempatan kerja dan turunnya angka kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi adalah syarat penting (*necessary*) dalam penurunan kemiskinan, namun hal ini belum cukup (*sufficient*) jika tidak diikuti oleh distribusi dan penyebarannya secara merata. Berikut disajikan peringkat kinerja pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk Miskin		Peringkat		Tingkat Pengangguran Terbuka			Peringkat		
		2009	2010	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		%	%			%	%	%			
1	Paser	10.11	9.49	7	9	7.76	7.64	6.82	9	12	13
2	Kutai Barat	8.97	9.9	9	8	6.83	7.37	7.97	10	13	11
3	Kutai Kartanegara	8.03	8.69	10	10	9.82	11.38	11.53	8	5	5
4	Kutai Timur	11.88	11.39	5	5	5.09	14.59	12.71	13	2	2
5	Berau	5.9	6.6	12	12	10.07	9.37	9.33	7	9	8
6	Malinau	16.55	15.31	1	1	6.5	5.29	3.88	11	14	14
7	Bulungan	15.96	14.58	2	2	6.38	8.42	9.12	12	11	10
8	Nunukan	13.47	12.45	4	4	13.17	9.43	7.67	3	8	12
9	PPU	11.38	10.47	6	6	10.74	10.87	9.78	6	6	6
10	Tana Tidung	15.42	13.89	3	3	-	13.89	12.03	-	3	3
11	Balikpapan	3.58	4.07	14	14	16.06	13.7	11.76	2	4	4
12	Samarinda	4.84	5.21	13	13	12.31	10.19	9.22	5	7	9
13	Tarakan	9.65	10.23	8	7	12.42	9.11	9.45	4	10	7
14	Bontang	6.66	6.67	11	11	16.32	14.66	12.77	1	1	1

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2011 (setelah diolah)

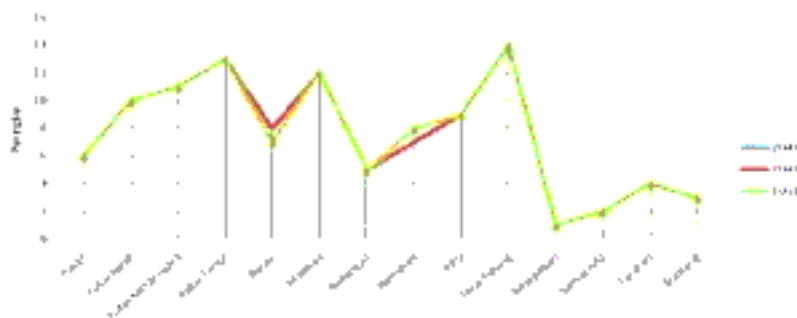
Persentase penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau dengan persentase mencapai 16.55 % dan 15.31%, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan diperingkat kedua. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah dipegang oleh Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Secara umum, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di tingkat Kabupaten/ Kota masih berada diatas persentase Provinsi Kalimantan Timur (7.86 % di tahun 2009, dan 8 % di tahun 2010), terkecuali pada Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Berau, dan Kota Bontang yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil. Bukti ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan besar dan membutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya.

Dari sisi tingkat pengangguran terbuka, terlihat bahwa Kota Bontang menempati peringkat pertama dengan tingkat pengangguran tertinggi, diikuti Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Tana Tidung. Terlihat juga kecenderungan pada wilayah-wilayah dengan tingkat penduduk miskin yang rendah, memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif

besar. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergerakan arus pencari kerja ke daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin rendah, yang dianggap memiliki ketersediaan dan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas dibandingkan daerah lain, namun dikarenakan para pencari kerja tersebut tidak memiliki kemampuan yang dipersyaratkan/ memadai, sehingga hanya menambah jumlah pengangguran pada daerah-daerah tersebut.

6. Analisis Kinerja Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah satu modal utama dalam proses pembangunan. Upaya peningkatan kualitas SDM, yang dalam skala lebih luas disebut sebagai pembangunan manusia, mutlak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, serta kemampuan daya beli di masyarakat (BPS, 2011). Berikut ditampilkan kinerja perkembangan IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2010
(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2011 (setelah diolah))

Rustan A.

Berdasarkan tabel peringkat diatas, secara umum terlihat bahwa tidak terjadi perubahan struktur peringkat Kabupaten/ Kota menurut nilai IPM yang dimiliki dalam rentang waktu tahun 2008 hingga tahun 2010. Sehingga, dapat diindikasikan bahwa perhatian dan kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan nilai IPM tidak banyak berubah. Oleh karenanya, diperlukan terobosan-terobosan kebijakan yang substansial sehingga mampu mengubah struktur peringkat ini, dan untuk kemudian mengejar 4 (empat) Kota maju di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki nilai IPM tertinggi. Kota Balikpapan memiliki nilai IPM tertinggi dan masih menduduki peringkat pertama dalam kurun waktu 2008-2010, yang mencerminkan tingginya pembangunan sumberdaya manusia di Kota tersebut. Nilai IPM tersebut ditunjang oleh prestasi pada komponen pendidikan (rata-rata lama bersekolah) dan pengeluaran perkapita penduduknya. Peringkat IPM tertinggi kedua diraih oleh Kota Samarinda yang nilai indeksnya ditunjang oleh tingginya pengeluaran perkapita penduduknya dan angka melek huruf, dan peringkat ketiga adalah Kota Bontang yang sebagian besar nilai indeksnya ditunjang oleh komponen pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup).

Adapun peringkat terendah adalah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan daerah pemekaran baru, yang masih membutuhkan akselerasi/ percepatan pembangunan. Terendah kedua adalah Kabupaten Kutai Timur yang dikenal sebagai salah satu daerah kaya di Kalimantan Timur namun masih rendah dalam peringkat mutu

sumberdaya manusianya; rendahnya peringkat IPM daerah ini ternyata berbanding terbalik dengan pencapaian pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, secara konseptual akan memberikan dampak linear pada peningkatan pembangunan manusia (human capital), namun ternyata tidak terbukti di daerah ini.

Dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 75.56 di tahun 2010, seluruh Kabupaten yang ada (10 Kabupaten) masih menunjukkan nilai di bawah level IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kenyataan ini menunjukkan masih belum berhasilnya upaya-upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas penduduknya.

7. Upaya Peningkatan Performa Pembangunan Daerah

a) Percepatan Pertumbuhan ekonomi (*Pro-Growth*)

Pertumbuhan ekonomi secara substansial dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan dan investasi. Terkait penciptaan aktivitas ekonomi yang optimal, pemerintah daerah perlu memperbanyak/ memfasilitasi penyediaan sektor-sektor *non-base*, yaitu sektor-sektor penyokong aktivitas ekonomi yang tidak berorientasi ekspor. Hal ini penting mengingat *base sector* atau sektor unggulan daerah, seperti sektor penggalian dan penambangan berorientasi pada ekspor dan efek ekonomis bagi aktivitas ekonomi lainnya cukup kecil. Penting untuk diketahui, *base sector* sangat penting bagi pembangunan daerah, namun *base sector* tersebut harus memberikan

efek sebar ekonomi yang besar bagi aktivitas ekonomi lokal, dan agar efek sebar ekonomi ini besar, keberadaan *non-base sector* (seperti sektor jasa, *trade and restaurant*, serta *public utilities*) harus diperbanyak sehingga aliran transaksi ekonomi akibat keberadaan *base* sektor mampu meningkatkan pendapatan masyarakat/ sektor lainnya ditingkat regional. Dengan demikian, kasus-kasus akibat ketimpangan pendapatan antarsektor dapat diminimalisir.

Untuk mendukung ketersediaan *non-base* sektor pada ekonomi daerah, penulis menyarankan pemerintah daerah agar mendorong pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah serta koperasi. Memberikan dukungan dengan penyediaan kredit usaha dengan bunga ringan yang terkontrol dan mudah, serta memberikan kemudahan pengurusan perijinan bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerahnya.

Kebijakan untuk menggiatkan ekonomi kerakyatan dapat dimulai dengan mereplikasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang telah diterapkan dan berhasil di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. BUMDes merupakan sebuah badan usaha milik desa di bawah koordinasi dari pemerintah daerah yang bergerak pada usaha yang disesuaikan dengan potensi masyarakat setempat, seperti pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan termasuk juga usaha yang bersifat

simpan pinjam guna permodalan dengan mekanisme sistem syariah atau bagi hasil. Dengan berdirinya BUMDes, masalah permodalan yang kerap menjadi permasalahan masyarakat dalam pengelolaan usaha, dapat diatasi dengan meminjam kepada BUMDes yang di luncurkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam pengelolaannya, BUMDes berbeda dengan usaha berbasis kerakyatan lainnya, hal tersebut didasari dengan sistem pengelolaannya langsung dikelola oleh masyarakat dengan koordinasi penuh dari pemerintah kabupaten sebagai pembuat kebijakan serta pihak kecamatan yang bertugas sebagai monitoring. Pembentukan BUMDes juga adalah langkah konkrit untuk memberikan sebuah kepastian usaha bagi pelaku perekonomian di Kabupaten Banjar melalui metode penerapan standar harga terendah, serta dengan adanya BUMDes diharapkan peran kuat dari para tengkulak (*broker*) dapat diminimalisir (Pekab Banjar, 2009).

Kebijakan lain yang diperlukan adalah penguatan belanja pembangunan infrastruktur dasar atau belanja modal yang dipahami untuk membiayai kesejahteraan masyarakat dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari analisis penulis, Penguatan belanja modal ini telah cukup dipahami oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, meskipun masih terdapat beberapa kabupaten/ kota yang

Rustan A.

kurang memprioritaskan belanja APBD-nya untuk belanja modal:

- 1) Data alokasi belanja APBD tahun 2010 memperlihatkan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan mengalokasikan belanja pegawai masih lebih besar dibandingkan belanja modal, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
Belanja pegawai Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 42.05 % dibandingkan belanja modal 37.08%; Kabupaten Paser mengalokasi belanja pegawai sebesar 40.36% sedangkan belanja modal hanya mencapai 32.61%; dan Kota Balikpapan memberikan porsi belanja pegawainya sebesar 33.23 % sedangkan untuk belanja modal sebesar 25.69%.
- 2) Adapun Kabupaten/ Kota lainnya lebih memilih untuk memprioritaskan belanja modal yang dimiliki dibandingkan belanja pegawai.

b) Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Tugas penting pemerintah daerah adalah bagaimana agar dapat mendorong penduduk miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Hal ini penting dikarenakan kemiskinan *juga* terjadi akibat kurangnya kesadaran individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dan keluarganya. Dengan demikian, meningkatkan kapasitas

pribadi penduduk miskin untuk menangkap kesempatan memperbaiki kesejahteraannya perlu terus digalakkan dengan mengoptimalkan upaya-upaya pembekalan atas *skill* dan *knowledge* mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah daerah juga perlu membuka dan menghubungkan mereka dengan jejaring usaha dan pasar tenaga kerja, sehingga kesempatan mereka untuk berkembang akan semakin besar.

Banyaknya jumlah pengangguran adalah salah satu *concern* utama dari pemerintah daerah, sebab hal ini secara langsung mencerminkan kemakmuran dan kinerja ekonomi suatu daerah. Disamping itu, juga menunjukkan kondisi ketersediaan kesempatan kerja dan tingkat daya serap angkatan kerja produktifnya. Kebijakan yang diperlukan untuk menekan jumlah pengangguran adalah dengan menahan tenaga kerja produktif untuk tetap bersekolah/melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka mampu meningkatkan *skill* dan kompetensinya, juga ini akan mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (*skill labor*). Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah membuka secara luas pengembangan sektor pertanian (sektor yang padat karya) pada lokasi-lokasi yang kompetitif.

Kebijakan lain yang masih perlu terus dikelola adalah pembukaan lapangan kerja baru bekerjasama dengan sektor swasta,

dan juga menyadarkan masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri sebagai *entrepreneurs* dalam bentuk ekonomi kerakyatan/kreatif. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan jaringan kredit usaha untuk masyarakat yang ingin membuka atau mengembangkan usaha mereka dengan tingkat bunga kredit yang rendah. Adapun *benchmark* yang bisa diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Program Mamangun Mahaga Lewu² yang telah dicanangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2008. Program ini membawa semangat untuk menumbuhkan ekonomi wilayah pedesaan dan tertinggal, mengurangi pengangguran, serta menurunkan angka kemiskinan melalui integrasi program dan kegiatan yang terencana, sinergis, terfokus, serta berkelanjutan. Program ini tidak membutuhkan pembentukan instansi/ unit khusus yang menanganinya, tidak membutuhkan program/ kegiatan dan pendanaan baru, dan juga tidak mengembangkan model baru maupun mengadopsi model tertentu, karena pendekatan utama yang dilakukan adalah mensinergikan dan memfokuskan seluruh sumber daya yang ada (program, kegiatan, dan pendanaan) pada desa tertinggal percontohan yang dipilih. Program Mamangun Mahaga Lewu dijalankan dengan terlebih dahulu melakukan analisis

terhadap *database* kemiskinan dan daerah tertinggal yang ada dengan turut mempertimbangkan tingkat kerawanan sosial daerah-daerah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemilihan desa/ kelurahan yang layak untuk dimasukkan dalam program ini. Terhadap desa/ kelurahan tertinggal percontohan yang dipilih selanjutnya dilakukan pemetaan potensi masing-masing desa/ kelurahan tertinggal percontohan tersebut untuk dikembangkan dan dilakukan perencanaan program/ kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa/ kelurahan tersebut (Pemprov Kalteng, 2008).

Upaya *benchmarking* terhadap daerah yang telah menunjukkan keberhasilan dalam bidang tertentu perlu dilakukan. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membudayakan kebiasaan meniru, namun semata-mata demi mempercepat proses perubahan dan kemajuan bagi suatu daerah/ instansi yang bersangkutan. Dengan adanya identifikasi dan diseminasi *best practice*, diharapkan akan dicapai kegunaannya paling tidak mencakup 3 dimensi (BKD Tarakan, 2007) :

- 1) U n t u k m e m o t i v a s i d a n mengapresiasi para pejabat dan anggota masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk mengimplementasikan *best practice* yang telah dihasilkan

² Program Mamangun Mahaga Lewu yang dikembangkan dengan sukses di Provinsi Kalimantan Tengah ini telah menjadi *benchmark* bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional (Bappenas mencatatkan terdapat 183 kabupaten di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal pada akhir 2009), dan sebagai salah satu *best practice* pemerintahan daerah, Program Mamangun Mahaga Lewu ini juga telah berhasil mendapatkan penghargaan "Meretas Ketertinggalan Award" dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Rustan A.

serta untuk menggali dan mengembangkan *best practice* lainnya;

- 2) Untuk membangkitkan semangat berkompetisi daerah atau instansi lainnya untuk melakukan hal yang sama;
- 3) Untuk mengakselerasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang pembangunan dan pelayanan

c) **Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Langkah kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pencapaian nilai IPM adalah dengan melakukan penguatan pada komponen-komponen yang masih lemah, seperti disektor pendidikan, yaitu dengan mendata jumlah dan potensi anak putus sekolah atau tidak bersekolah, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, menjamin kemudahan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, rasionalisasi tenaga pengajar dan pendistribusian yang merata bagi tenaga guru. Mengintensifkan peningkatan kemampuan dan kualitas guru, serta pemberian bantuan pendidikan/ beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu.

Peningkatan disektor kesehatan dapat ditempuh melalui, pembangunan infrastruktur kesehatan hingga di kawasan pedalaman, melengkapi fasilitas dan sarana penunjang kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan paramedis disetiap puskesmas, melaksanakan upaya penyadaran

untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat, serta kemudahan memperoleh layanan kesehatan dan obat-obatan secara murah/ gratis dan cepat. Adapun upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja ekonomi (investasi) serta kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan berujung pada peningkatan daya beli masyarakat.

8. Kinerja dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah: Sebuah Refleksi

Keberhasilan pencapaian kebijakan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan target yang telah disusun, sangat tergantung pada kemampuan aparatur pelaksananya (implementor kebijakan). Aparatur pemerintah daerah sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, memegang peran utama dalam meyakinkan dan menggerakkan komponen tersebut sesuai arah kebijakan publik yang telah disusun. Oleh karenanya, meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip *good governance* mutlak diperlukan.

Berbasis kompetensi (*competence based*) sebagai strategi mewujudkan keberhasilan pengelolaan aparatur pemerintah tersebut ditunjang dengan peningkatan profesionalisme dan disiplin PNS sebagai salah satu unsur birokrasi, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya PNS dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan lebih meningkatkan produktifitas kerjanya. Optimalisasi manajemen kepegawaian berbasis kompetensi juga akan mendorong birokrasi pemerintahan yang netral dan solid, karena birokrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak dibatasi waktu (*longterm*) serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terjadi diskriminasi perlakuan.

Masih banyaknya kasus KKN, pungutan liar, kinerja yang sering menunda juga membutuhkan akselerasi perubahan. Siagian dalam Juwari (2010) menunjukkan perilaku-perilaku *street level bureaucracy* (petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat) yang “menjengkelkan”, diantaranya:

- 1) Memperlambat proses pemberian ijin
- 2) Mencari berbagai dalih, seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis
- 3) Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain
- 4) Sulit dihubungi
- 5) Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”

Peningkatan *capacity building* aparatur pemerintah sebagai langkah *invest in people* dan *invest in organization* sangat diperlukan guna melahirkan aparatur-aparatur yang berkinerja tinggi dan kompeten dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ingraham dan Donahue (2000) menyatakan, “*government with more management capacity have the ability to perform better than governments with less management capacity, all else being equal*”

Oleh karenanya, dalam peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur perlu mencermati 4 komponen peningkatan kapasitas berikut (Acosta, 1991) dalam presentasi Utomo (2010) meliputi:

- 1) *Administrative system improvement, resulting in more flexible, responsive organizational structure, devolved resources, and efficient system and procedures.*
- 2) *Developing staff competencies, upgrading the knowledge and skills of managerial and technical manpower.*
- 3) *More effective goal-setting, creating an organizational culture that facilitates the interaction of various sectors in the community, the political leadership and the local bureaucracy in goal setting and attainment; and.*
- 4) *Internalizing public accountability, inculcating among the local political leadership and the bureaucracy the value of committed, competent, responsive, and responsible public service.*

Rustan A.

Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas (Mustopadidjaja, 2001)

9. Penutup

Penerapan kebijakan pembangunan yang *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-human development* adalah dimensi sosial-ekonomi yang *urgent* untuk diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis peringkat yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan penilaian per-dimensi kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah; ditinjau dari pertumbuhan PDRB, peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Paser dan Kabupaten Malinau. Ditinjau dari pertumbuhan PDRB Perkapita, peringkat tertinggi diraih oleh Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser. (2) kebijakan yang berorientasi pada lingkungan sosial; ditinjau dari capaian persentase penduduk miskin yang rendah, dicapai oleh Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sedangkan dari persentase tingkat pengangguran terbuka terendah diperoleh oleh Kabupaten Malinau dan Kabupaten Paser. (3) kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, ditinjau dari peringkat IPM yang diperoleh, keempat Kota di Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat tertinggi yaitu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Tarakan. Berdasarkan hasil tersebut di atas, secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki kinerja *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-human development* terbaik di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.

Dari hasil analisis peringkat tersebut, dapat diketahui bahwa tiap Kabupaten/ Kota memiliki keunggulan masing-masing pada dimensi kebijakan tertentu. Dengan demikian, upaya *benchmarking* atau replikasi kebijakan antar Kabupaten/ Kota yang berhasil pada suatu dimensi sangat diperlukan, agar dapat semakin mengoptimalkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, disamping juga dapat memacu keberhasilan pembangunan secara kewilayahan/ regional Kalimantan Timur secara agregat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2011. *Kalimantan Timur Dalam Angka 2010*. BPS Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda
- Badan Kepegawaian Daerah Kota Tarakan, 2007. *Membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Secara Mandiri : Dokumentasi Best Practice di BKD Kota Tarakan*. BKD, Tarakan
- Dye, T.R., 1992. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall
- Fauzi, Gamawan., 2011. *Pelaporan Keuangan Pemda Tidak Efisien*. Diunduh dari www.kompas.com pada Rabu, 9 November 2011
- Gazi, Mainul Hassan. 2007. *Public Expenditure, Employment, and Poverty in Bangladesh: An Empirical Analysis*. North South University
- Hall, Jeremy., 2007. *Informing State Economic Development Policy in the New Economy: A Theoretical Foundation and Empirical Examination of State Innovation in the United States*. Article in Public Administration Review, July-August 2007. GS PA, University of Colorado. Denver
- Ingraham and Donahue, 2000. *Dissecting the Black Box Revisited In Governance and Performance: New Perspectives*. Georgetown University Press. Washington, DC
- Juwari, Ahmad., 2010. *Pembangunan dan Birokrasi Biaya Tinggi*. Artikel dalam Buku Reformasi Aparatur Negara ditinjau kembali (Bab 20). Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Mehmood and Sadiq, 2010. *The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Co integration Analysis*. Romanian Journal of Fiscal Policy
- Mustopadidjaja, 2001. *Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, Dan Pembangunan Masyarakat Madani*. Makalah Disampaikan Pada Silaknas ICMI 2001, Bertema "Mobilitas Sumber Daya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Madani Dan Percepatan Perwujudan Good Governance"
- Pemerintah Kabupaten Banjar, 2009. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Available on www.banjarkab.go.id, diakses tanggal 15 Agustus 2009
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008. *Mamangun Mahaga Lewu: Terobosan Kalimantan Tengah*. Available on www.kalteng.go.id, diakses tanggal 20 Februari 2008
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014
- Purwanto, Erwan Agus., 2010. *Subsidi Sebagai Instrument Kebijakan Public: Dilemma Antara Rasionalitas Ekonomi Versus Viabilitas Politik*. Artikel dalam Buku Reformasi Aparatur Negara ditinjau

Rustan A.

- kembali (Bab 15). Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Tambunan, Tulus., 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Tarigan, Robinson., 2005. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Teddy lesmana, 2007. *Defisit Tata Kelola Yang Baik (Good Governance Deficit)*. Artikel pada Batam Pos, 16 Januari 2007
- Utomo, Tri Widodo W., 2010. *Public Service Capacity Building: From Capacity to Excellence*. Presentasi disampaikan pada workshop *Capacity Building for Improving Performance of Public Service*" di Banjarbaru, 22 Juni 2010
- Yayasan Indonesia forum, 2000. *Aspek Finansial Otonomi Daerah*. Laporan Kajian di Delapan Provinsi. Jakarta

